

**Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap
Penyusutan Aset Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Sumatera Utara**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

NAMA : SINTANNI DEWI
NPM : 1405170099
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIAH SUMATERA UTARA
(U M S U)
MEDAN
2018**

**Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap
Penyusutan Aset Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Sumatera Utara**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**NAMA : SINTANNI DEWI
NPM : 1405170099
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIAH SUMATERA UTARA
(U M S U)
MEDAN
2018**

LAMPIRAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : SINTANNI DEWI
N P M : 1405170099
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
Pemerintah Terhadap Penyusutan Aset Tetap
pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera
Utara

Dinyatakan : (C/B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Dr. Mulyarsyah, S.E., M.Si

Penguji II

Muhammad Fahmi, S.E., M.M

Pembimbing

Sri Rahayu, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. Januri, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

Ade Gunawan, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus Utama UMSU Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Medan 20238, Telp (061) 661059

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : SINTANNI DEWI
N.P.M : 1405170099
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN TERHADAP PENYUSUTAN
ASET TETAP PADA DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui Dan Memenuhi Persyaratan Untuk Diajukan Dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan , Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(SRI RAHAYU, SE, M.Si)

Diketahui/ Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SINTANNI DEWI
NPM : 1405170099
Jurusan : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penyusutan Aset Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari kantor dimana saya melakukan riset yaitu pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, April 2018

Yang membuat pernyataan


(SINTANNI DEWI)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus Utama UMSU Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Medan 20238, Telp (061) 661059

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SINTANNI DEWI
N.P.M : 1405170099
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : **ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP PENYUSUTAN ASET TETAP PADA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
27/02/18	PSAP aset tetap perbaikan. kasibel ya ditunjuk		
12/03-18	dyas + Rensi & Rempul Lans Sipul. Analisis & Pembahasan lebih di pordalaw		
13/03-18	Selon ditg. stipro		

Pembimbing Skripsi

(SRI RAHAYU, SE, M.Si)

Medan, Februari 2018
Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

ABSTRAK

SINTANNI DEWI 1405170099. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penyusutan Aset Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.

Penerapan terhadap beban penyusutan aset tetap, menggunakan metode penyusutan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) tahun 2010 basis akrual. Metode penyusutan aset tetap mulai diterapkan dan diakui pada tahun 2015 untuk menghitung beban penyusutan aset tetap. Adanya beban penyusutan akan mengakibatkan penurunan aset tetap dan ekuitas pemerintah pada neraca laporan keuangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyajian nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset. Metode analisis yang digunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengambil data-data yang diperlukan dan mempelajari serta menganalisis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menghitung beban penyusutan aset tetap pemerintah menerapkan metode garis lurus setiap tahunnya telah dilakukan dengan baik. Tidak adanya akumulasi penyusutan pada tahun 2014 dikarenakan pada tahun tersebut pemerintah masih menerapkan basis kas pada laporan keuangannya.

Kata Kunci : *Penerapan, Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyusutan Aset Tetap*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu WaTa'ala, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq serta Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penyusutan Aset Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara*" ini guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ekonomi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan, dan wawasan yang penulis miliki sehingga pada skripsi ini masih banyak kekurangan baik dalam penyajian materi maupun penggunaan tata bahasa. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan bimbingan serta penghargaan yang tidak ternilai kepada :

1. Allah SWT atas berkah, rahmat, hidayah dan nikmat yang telah diberikannya kepada penulis serta rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan.

2. Ayahanda dan Ibunda tercinta dan seluruh keluarga besar yang menjadi semangat dalam hidup penulis dan selama ini senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus serta doa maupun dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini untuk mendapatkan gelar sarjana nantinya.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Sri Rahayu, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing.
10. Bapak Dr. Irfan, SE, MM selaku Dosen Pembimbing.

11. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai-pegawai yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
12. Kepala Dinas serta seluruh staff Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.
13. Rodiah Bintang (Obin) yang selalu sama menemani dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman Akuntansi Kelas A malam, terutama Henny, Uni, Imam, Hendra, Fachry, dan Agung, terima kasih sekali atas dukungan dan doa dari kalian semua semoga apa yang kita cita-citakan selama ini dapat kita capai.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah SWT senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya untuk kita semua. Semoga seluruh bantuan dan budi yang telah diberikan kepada penulis akan senantiasa mendapatkan balasan dari Allah SWT Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan,

Penulis,

SINTANNI DEWI
NPM. 1405170099

DAFTAR ISI

	HALAMAN
COVER	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II : LANDASAN TEORI.....	7
A. Uraian Teoritis.....	7
1. Defenisi Akuntansi.....	7
a. Pengertian Akuntansi.....	7
b. Pengertian Aset Tetap Menurut SAP.....	8

c. Pengertian Penyusutan Aset Tetap Menurut SAP.....	9
d. Faktor Penentu Penyusutan.....	10
e. Dasar Penyusutan Aset Tetap.....	10
f. Obyek Penyusutan Aset Tetap.....	13
g. Syarat Penyusutan Aset Tetap.....	15
h. Prosedur Penyusutan Aset Tetap.....	20
B. Penelitian Terdahulu.....	38
C. Kerangka Berpikir.....	39
BAB III : METODE PENELITIAN.....	41
A. Pendekatan Penelitian.....	41
B. Definisi Operasional.....	41
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	42
D. Sumber Data dan Jenis Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Hasil Penelitian.....	46
1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	46
2. Deskripsi Data.....	47
a. Analisa Penerapan Penyusutan Aset Tetap.....	47

b. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penyusutan Aset Tetap Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.....	54
B. Pembahasan.....	63
1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penyusutan Aset Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.....	63
2. Kendala Pada Penerapan Penyusutan Aset Tetap.....	64
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Aset Tetap Dinas Tenaga Kerja Provsu.....	4
Tabel II.1 Contoh Penyusutan tahun pertama hingga tahun kelima.....	30
Tabel II.2 Penyusutan.....	32
Tabel II.3 Contoh penyajian beban penyusutan.....	35
Tabel II.4 Contoh daftar aset tetap dan penyusutan.....	37
Tabel II.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel III.1 waktu penelitian.....	43
Tabel IV.1 Laporan Keuangan Neraca.....	47
Tabel IV.2 Laporan Keuangan Neraca.....	50
Tabel IV.3 Laporan Keuangan Neraca.....	52
Tabel IV.4 Data Neraca Aset.....	55
Tabel IV.5 Data Neraca Aset	56
Tabel IV.6 Data Neraca Aset.....	58
Tabel IV.7 Penyusutan Aset Tetap.....	59
Tabel IV.8 Penyusutan Aset Tetap.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berpikir.....	40
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanggungjawaban Pemerintah dalam mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan dan masyarakatnya berbentuk Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Pemerintah Pusat mengatur bahwa Laporan Keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Aset tetap adalah elemen utama dari kekayaan perusahaan/instansi yang berjumlah besar dan mengalami penyusutan dalam satu periode. Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Penentuan besarnya jumlah biaya penyusutan aset tetap ini merupakan masalah penting di dalam perusahaan/instansi, karena besar kecilnya investasi yang tertanam di dalam aset tetap mempengaruhi efektifitas perusahaan/instansi yang pada akhirnya akan mempengaruhi pada keuntungan ataupun kinerja perusahaan/instansi itu sendiri.

Dalam rangka penyajian wajar atas nilai aset tetap tersebut, pemerintah dapat melakukannya melalui penetapan kebijakan penyusutan. Mengingat aset tetap memiliki masa manfaat yang panjang, maka aset tetap merupakan suatu unsur laporan keuangan pemerintah yang paling kongkrit mengemban asumsi perlunya pemerintah menjaga keseimbangan kepentingan antar generasi.

Adanya penyusutan akan memungkinkan pemerintah untuk setiap tahun memperkirakan sisa manfaat suatu aset tetap yang diharapkan dapat diperoleh dalam masa beberapa tahun ke depan.

Disamping itu, adanya penyusutan memungkinkan pemerintah mendapat suatu informasi tentang keadaan potensi aset yang dimilikinya. Hal ini akan memberi informasi kepada pemerintah suatu pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan berbagai belanja pemeliharaan atau bahkan belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki.

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara yang merupakan Instansi dan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Provinsi, di bidang kesekretariatan, pembinaan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perlindungan dan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta tugas pembantuan. Dan semua yang terkait dengan urusan dan tugas ada di bidang usaha masing-masing dan setiap bidang terdiri dari beberapa Seksi yang terlibat dibidangnya. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara adalah Kantor Dinas yang membantu Gubernur Sumatera Utara dalam tugas otonomi, tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berskala provinsi (lintas kabupaten/kota). Penyelenggaraan atau terkait dengan kegiatan operasional instansi memanfaatkan asset yang dimiliki oleh instansi, salah satunya adalah aset tetap dan memiliki masa manfaat yang dapat disusutkan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pertama kali yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pada tanggal 13 juni 2005. Inilah untuk pertama kali indonesia memiliki standar akuntansi pemerintahan sejak indonesia merdeka. Terbitnya SAP ini juga mengukuhkan peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan pemerintahan. SAP ini lama ditunggu kehadirannya setelah ada penegasan yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 pada pasal 35 bahwa penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintahan daerah yang berlaku.

Sejak saat itu banyak UU yang dimana menyebutkan bahwa peraturan – peraturan daerah yang berlaku sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Diantaranya UU No 17 Tahun 2003 yang juga menyebutkan dengan jelas bahwa bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. UU No 1 Tahun 2004 juga menyebutkan arti penting standar akuntansi pemerintahan bahkan memuat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) sebagai penyusun SAP yang keanggotanya ditetapkan dan diputuskan presiden. UU otonomi daerah juga menegaskan demikian, UU Nomor 32 Tahun 2004.

Saat ini, SAP menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 tidak berlaku lagi dan diganti dengan SAP menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan SAP berbasis Akrual yang ditetapkan pada tanggal 22 oktober 2010 dan dapat mulai ditetapkan sejak peraturan pemerintahan tersebut ditetapkan.

SAP Berbasis Akrual merupakan amanat dari pasal 36 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2010 dan Pasal 70 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2004, sehingga PP

Nomor 24 Tahun 2005 memang harus diganti. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan No 18 tentang akuntansi penyusutan berbasis akrual ada metode penyusutan yang telah ditentukan.

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan dari beban penyusutan per periode yang muncul dalam neraca. Berikut ini data aset tetap Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara:

Table I.1
Data Aset Tetap
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015	Tahun 2014
Aset Tetap			
Tanah	Rp. 25.081.782.600	Rp. 25.081.782.600	Rp. 35.220.487.100
Peralatan dan Mesin	Rp. 7.123.319.697	Rp. 6.820.251.197	Rp. 6.773.290.597
Gedung dan Bangunan	Rp. 11.246.862.000	Rp. 10.585.791.000	Rp. 11.876.707.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 84.790.000	Rp. 84.790.000	Rp. 84.790.000
Aset Tetap Lainnya	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
Akumulasi Penyusutan	(Rp. 16.451.006.658)	(Rp. 15.580.534.408)	Rp. 0
JUMLAH ASET TETAP	Rp. 27.085.747.639	Rp. 26.992.080.389	Rp. 53.955.274.697

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

Pada table I.1 diatas berdasarkan data aset tetap hasil dari laporan keuangan tahun 2014, 2015, dan 2016 yang diperoleh, adanya akumulasi penyusutan pada tahun 2015 dan tahun 2016, namun pada tahun 2014 tidak menunjukkan akumulasi penyusutan. Perlu adanya pembahasan mengenai

penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang berdampak pada penurunan nilai aset tetap dan ekuitas pemerintah pada neraca laporan keuangan.

Sehubungan dengan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penyusutan Aset Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara”

B. Identifikasi Masalah

Adanya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan aset tetap pada tahun 2015 dan 2016. Tidak adanya akumulasi penyusutan aset tetap pada tahun 2014.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dikemukakan dan teridentifikasi di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyusutan aset tetap menurut Standar Akuntansi Pemerintah di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusutan Aset Tetap sudah tepat dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penyusutan aset tetap yang diterapkan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.
- b. Menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah dengan harapan bahwa penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis, juga dapat bermanfaat bagi perusahaan serta bagi akademis sehingga dapat diimplementasi di lapangan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

a. Bagi Peneliti

Berharap dapat mampu mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara sistematis sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yakni masalah penerapan penyusutan aset tetap menurut SAP.

b. Bagi Instansi

Diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi bahan evaluasi berkenaan dengan penerapan penyusutan aset tetap.

- c. Bagi Pembaca Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Defenisi Akuntansi

a. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan (Weygrandt dkk, 2007:4) sedangkan pengertian akuntansi menurut *Komite Terminologi dari American Institute Of Certified Public Accountans* adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian diantaranya, memiliki sifat keuangan, dari selanjutnya menginterpretasikan hasilnya. Dengan demikian, akuntansi merupakan suatu proses pencatatan maupun pengklasifikasian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat digunakan oleh para pengguna yang berkepentingan untuk mengambil keputusan maupun tujuan lainnya.

b. Pengertian Aset Tetap Menurut SAP

Menurut Buletin Teknis Nomor 18 SAP (2010:3) Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya.

Pengertian Aset Tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Pemerintah juga harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap. Dalam kasus lain, aset tetap yang dikuasai oleh pemerintah tetapi tujuan penggunaannya untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah tidak termasuk dalam pengertian aset tetap karena tidak memenuhi definisi aset tetap di atas, misalnya aset tetap yang dibeli pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat. Maksud dari masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

c. Pengertian Penyusutan Aset Tetap Menurut SAP

Menurut Buletin Teknis Nomor 18 SAP (2010:1) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat.

Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

- 1) Metode garis lurus (*straight line method*)
- 2) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
- 3) Metode unit produksi (*unit of production method*)

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

d. Faktor Penentu Penyusutan

Terkait dengan penyusutan Aset Tetap, terdapat tiga faktor yang harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah beban penyusutan (*beban depresiasi*) Aset Tetap, yaitu:

1) Harga perolehan Aset Tetap

Harga perolehan yaitu sejumlah uang yang dikeluarkan dalam memperoleh aktiva tetap hingga siap digunakan.

2) Masa manfaat Yang Diharapkan

a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

b) Jumlah Produksi atau Unit Serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

3) Perkiraan nilai aset tetap pada akhir masa manfaat (nilai residu/nilai sisa) Nilai sisa atau nilai residu adalah jumlah yang diperkirakan dapat direalisasikan pada saat aktiva tidak digunakan lagi.

e. Dasar Penyusutan Aset Tetap

PSAP 07 mengatur penyusutan pada bagian pengukuran aset tetap dan penyajiannya pada periode-periode setelah pengakuan awal nilai aset tetap. Paragraf 53 hingga 57 PSAP 07 menguraikan perihal penyusutan sebagai berikut:

53. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan

penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

54. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

55. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

56. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain: (a) Metode garis lurus (*straight line method*); atau (b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*) (c) Metode unit produksi (*unit of production method*).

57. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial. Penyesuaian nilai ini lebih merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai karena pengkonsumsian potensi manfaat

aset oleh karena pemakaian dan atau pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain.

Penerapan penyusutan aset tetap dilakukan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 53 di atas, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode dicatat pada akun Akumulasi Penyusutan dengan lawan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap dan disajikan sebagai pengurang akun Aset Tetap. Pencatatan penyusutan menghadapi berbagai permasalahan. Masalah dalam akuntansi penyusutan suatu aset tetap adalah penentuan jenis aset yang disusutkan, jumlah yang dapat disusutkan, metode penyusutan dan penentuan masa manfaat keekonomian. Dengan menyadari permasalahan tersebut, dalam mencatat dan menyajikan penyusutan, prasyarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Harus dapat diidentifikasi aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun.
2. Harus ditetapkan nilai yang dapat disusutkan.
3. Harus ditetapkan masa manfaat dan kapasitas aset tetap.

f. Obyek Penyusutan Aset Tetap

Baik di sektor swasta maupun sektor pemerintahan, tidak semua aset tetap harus disusutkan. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap yang memiliki masa manfaat terbatas. Tanah yang umumnya diyakini memiliki masa manfaat yang tidak terbatas tidak disusutkan.

Untuk Aset tetap yang termasuk Barang Milik Negara, sesuai dengan PMK no 1/PMK.06/2013, aset tetap yang disusutkan adalah :

- a) gedung dan bangunan
- b) peralatan dan mesin
- c) Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan
- d) Aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik modern.

Aset tetap renovasi adalah renovasi atas aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan kapitalisasi.

Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Aset tetap yang tidak disusutkan adalah :

- 1) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya, dan
- 2) Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya.

Berdasarkan PMK no 1/PMK.06/2013, aset tetap yang hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola untuk dilakukan penghapusannya, diperlakukan sebagai berikut:

- a) Direklasifikasi ke dalam daftar barang hilang.
- b) Tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Barang Pengguna, Laporan Barang Milik Negara (LBMN), serta Neraca.
- c) Diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

Selanjutnya jika Surat Keterangan Penghapusan telah diterbitkan, maka BMN tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang.

Dalam hal aset tetap yang sebelumnya dinyatakan hilang dan telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola Barang, dikemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut direklasifikasi dari Daftar Barang Hilang ke akun aset tetap dan disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap. Untuk aset tetap yang memiliki bukti kepemilikan, aset tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah aset tetap tersebut ditemukan. Apabila aset tetap tersebut tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan atas aset tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke Daftar Barang Hilang dan akumulasi penyusutan selama

periode dimana aset tetap bersangkutan dicatat pada Daftar Barang Hilang.

Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola Barang untuk dihapuskan diperlakukan sebagai berikut :

- a) Direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Yang Rusak Berat.
- b) Tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Barang Pengguna, Laporan Barang Milik Negara (LBMN), serta Neraca.
- c) Diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

g. Syarat Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran hutang atau penggantian aset tetap yang disusutkan.

Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan. Untuk menerapkan penyusutan, prasyarat yang perlu dipenuhi adalah:

- 1) Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun Aset tetap harus dapat diidentifikasi sehingga dapat dibedakan antara aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya dengan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya. Aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun adalah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan sebagainya. Sedangkan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya akan memerlukan penyesuaian nilai, sehingga perlu disusutkan. Sebaliknya, aset tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya tidak perlu disusutkan.
- 2) Nilai yang Dapat Disusutkan Nilai aset tetap menjadi prasyarat dalam penyusutan. PSAP menganut nilai historis, sehingga kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis, nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah nilai perolehannya. Tanpa mengetahui nilai perolehan aset tetap, maka nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak dapat dihitung. Selain itu, nilai perolehan pun menjadi faktor penentu besarnya nilai buku. Nilai buku diperoleh dari pengurangan nilai perolehan dengan nilai akumulasi penyusutan. Sebelum penerapan SAP, entitas pemerintah mencatat nilai aset tetap dengan pengukuran yang berbeda dengan berbagai acuan. Dengan berlakunya SAP maka penilaian aset tetap harus disesuaikan dengan pedoman yang diatur dalam Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal.

Nilai wajar yang sesuai dengan SAP akan menjadi dasar dalam menentukan nilai aset tetap yang dapat disusutkan. Di lingkungan pemerintah, aset tetap diniatkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya. Selain itu, penyusutan aset tetap tidak dimaksudkan dalam rangka penandingan antara biaya dengan pendapatan. Meskipun terhadap suatu aset tetap dapat ditentukan nilai residunya, dengan kedua alasan ini, maka nilai sisa/residu tersebut diabaikan dalam menghitung penyusutan. Aset tetap masih memiliki nilai selama masih dapat dimanfaatkan, sehingga pada prinsipnya tidak dikenal nilai residu. Dengan demikian, nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*).

- 3) Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Ukuran manfaat itu sendiri berbeda-beda. Ada yang dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak. Suatu kendaraan atau mesin, misalnya, secara teknis dapat dilengkapi dengan keterangan dari produsen tentang potensi total jarak yang dapat ditempuh atau potensi total jam kerja penggunaan. Akan tetapi, unit manfaat dari aset tetap seperti komputer, gedung, atau jalan, misalnya relatif lebih tidak dapat dikuantifikasi. Akibatnya, untuk aset yang tidak mempunyai unit manfaat yang tidak terkuantifikasi dengan spesifik, dipakailah

indikator pengganti seperti prakiraan potensi masa manfaat. Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan panjang masa manfaat, perhitungan penyusutannya secara individual atau secara berkelompok membutuhkan ketetapan prakiraan tentang masa manfaatnya. Masa manfaat ini secara teknis akan bergantung dari karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau intensitas pemanfaatannya. Oleh karena sifat fisiknya dan kerentanannya terhadap perubahan teknologi, misalnya perangkat komputer, akan dianggap memiliki masa manfaat yang lebih pendek daripada gedung dan bangunan. Intensitas dan cara pemakaian bus pegawai dibandingkan dengan lemari pajangan misalnya, akan mengarahkan pada anggapan bahwa masa manfaat bus pegawai lebih pendek daripada masa manfaat lemari pajangan. Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan indikator total unit manfaat potensial, perhitungan penyusutannya secara individual atau secara berkelompok membutuhkan ketetapan prakiraan tentang total unit manfaat potensial. Manfaat aset dengan indikator manfaat yang spesifik ini secara teknis akan bergantung pada karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau intensitas pemanfaatannya juga. Pada kelompok aset tetap, misalnya peralatan dan mesin, mungkin akan dijumpai bahwa intensitas pemanfaatan kendaraan yang diukur dalam jarak perjalanan yang ditempuh, berbeda satu sama lain. Jumlah jarak yang ditempuh oleh bus pegawai, misalnya akan berbeda dari

jarak yang ditempuh oleh mobil dinas kepala kantor. Perbedaan masa manfaat dan intensitas pemanfaatan ini perlu diketahui untuk menetapkan metode penyusutan. Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan panjang masa manfaat dapat dipilih metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun berganda. Dalam hal ini, masa manfaat akan menjadi dasar perhitungan penyusutan. Intensitas pemanfaatan aset akan mempengaruhi pemilihan metode penyusutan unit produksi. Dalam hal ini, intensitas pemanfaatan akan diukur dengan unit kapasitas atau produksi yang termanfaatkan. Pada gilirannya, unit kapasitas atau produksi yang termanfaatkan ini akan dibandingkan dengan seluruh potensi kapasitas/produksi yang dikandung oleh suatu aset tetap. Hanya dengan terpenuhinya ketiga prasyarat di atas, penyusutan dapat dihitung. Tanpa prasyarat pertama, maka kedua prasyarat terakhir menjadi tidak relevan. Sedangkan perhitungan tiap metode penyusutan memang membutuhkan kuantifikasi prasyarat kedua dan ketiga. Hal ini tampak dari rumusan perhitungan penyusutan tiap metode sebagai berikut:

a) Metode Garis Lurus

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

b) Metode Saldo Menurun Berganda

Penyusutan per periode = $(\text{Nilai yang dapat disusutkan} - \text{akumulasi penyusutan periode sebelum}) \times \text{Tarif Penyusutan}^*$

*tarif penyusutan dihitung dengan rumus

$$\frac{1}{\text{Masa Manfaat}} \times 100\% \times 2$$

c) Metode Unit Produksi

Penyusutan per periode =

$(\text{Produksi Periode berjalan} \times \text{Tarif Penyusutan}^{**})$

**tarif penyusutan dihitung dengan : $\frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Perkiraan Total Output}}$

h. Prosedur Penyusutan Aset Tetap

Langkah-langkah penyusutan aset tetap sebagai berikut:

1. Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan

Langkah ini untuk meyakinkan bahwa entitas akuntansi yang akan melaksanakan pencatatan penyusutan tidak akan memasukkan aset tetap berupa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan sebagai aset tetap yang akan disusutkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

- a) Dapatkan daftar aset tetap yang disajikan dalam neraca
- b) Identifikasi apakah Neraca menyajikan pos Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan.
- c) Jika Neraca menyajikan pos Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan, keluarkan dari daftar aset tetap yang akan disusutkan.

2. Pengelompokan Aset

a) Aset Berkelompok

Penyusutan dapat dilakukan terhadap aset tetap secara individual. Akan tetapi, penyusutan dapat pula dilakukan terhadap sekelompok aset sekaligus. Hal ini tentu memerlukan pemahaman tentang cara-cara pengelompokan aset. Jika aset yang seyogyanya disusutkan per kelompok tetapi disusutkan secara individual, maka akan menimbulkan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Penyusutan adalah pengakuan atas pengonsumsiannya manfaat suatu aset atau berlalunya waktu yang membuat suatu aset menjadi usang atau rusak. Secara teknis, ada aset yang baru bisa dimanfaatkan sekaligus bersamaan dengan aset lain, tetapi ada pula yang bisa dimanfaatkan secara individual. Jika aset yang manfaatnya hanya ada secara berkelompok tetapi dipandang dapat dimanfaatkan secara individual, maka pengertian konsumsi manfaat menjadi dilanggar.
- 2) Jika masalah pertama terjadi, maka pengakuan penyusutan menjadi tidak sepadan dengan manfaatnya. Misalnya, kursi tamu dari kayu jati dan meja tamu dari besi dan kaca yang dibeli dengan harga satu set. Seyogyanya keduanya dianggap sebagai aset yang manfaatnya hanya ada secara kelompok. Daya tahan kedua aset secara individual bisa jadi berbeda, karena meja dari besi dan kaca bisa jadi lebih rentan terhadap

kerusakan akibat karat dan pecah. Akibatnya secara individual, masa manfaat kedua aset secara individual akan berbeda yang pada gilirannya akan menghasilkan dua angka penyusutan yang bila dijumlah belum tentu sama dengan jika keduanya disusutkan secara berkelompok.

Berdasarkan dua permasalahan di atas, langkah-langkah pengelompokan aset yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Dapatkan seluruh daftar aset tetap.
- 2) Identifikasi aset-aset yang dapat dianggap sebagai aset yang harus disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama.
 - b) Manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain (peralatan kesehatan seperti kamera sinar X dan alat pencetakan film sinar X, dan lain-lain).
 - c) Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya mesin cetak digital, komputer, dan perangkat lunaknya).
 - d) Walaupun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung dengan aset lain, tetapi demi kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, berbagai aset dapat dikelompokkan

karena kedekatan teknik dan konteks pemanfaatannya (misalnya peralatan bedah).

- 3) Dapatkan catatan nilai awal seluruh aset dalam kelompoknya.
- 4) Susun daftar aset per kelompok dan nilai awalnya.

i. Aset Individual

Terhadap aset yang tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan langkah-langkah 2), misalnya gedung dan bangunan, dapatkan catatan nilai awal tiap individu aset. Kemudian susun daftar aset individual dan nilai awalnya.

3. Penetapan Nilai Aset Tetap yang Wajar

Masalah penyusutan yang paling pokok adalah penetapan nilai aset tetap. Nilai aset tetap adalah prasyarat untuk menentukan nilai yang dapat disusutkan. Akan tetapi, sebagaimana dijumpai dalam penyusunan neraca awal, penilaian aset tetap adalah masalah yang cukup pelik karena hal-hal sebagai berikut:

- a) Dokumen bukti kepemilikan aset tetap tidak jelas sehingga pengakuan aset sebagai suatu kekayaan entitas akuntansi tidak jelas.
- b) Akte jual beli, kwitansi pembelian, atau catatan lain yang menunjukkan nilai suatu aset tetap pada saat diperoleh tidak ada atau tidak lengkap. Hal ini bisa disebabkan aset tidak diperoleh dengan cara membeli, atau dokumen bukti nilai perolehan rusak atau hilang.

c) Terhadap aset tetap yang tergolong dalam masalah 2) belum dilakukan penilaian oleh penilai yang profesional.

4. Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan

Oleh karena aset tetap milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual, melainkan untuk sepenuhnya digunakan sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah, maka nilai sisa/residu tidak diakui. Dengan demikian, setiap nilai aset tetap, baik yang bersifat individual maupun kelompok, langsung diakui sebagai nilai yang dapat disusutkan.

5. Penetapan Metode Penyusutan

Penghitungan besarnya penyusutan setiap periode ditentukan menggunakan metode penyusutan. PSAP 07 tahun 2010 menyediakan antara lain, tiga metode yang dapat digunakan. Metode penyusutan bebas untuk dipilih. Secara umum ketiga metode selalu diasosiasikan dengan tingkat kerumitan penghitungan penyusutannya. Dalam hal ini, metode garis lurus adalah metode yang paling populer karena dirasakan paling sederhana. Yang paling dirasa rumit, adalah metode saldo menurun berganda. Akan tetapi, di luar dari pertimbangan kerumitan, sebenarnya metode penyusutan dapat dikaitkan dengan karakteristik aset dan cara serta intensitas pemanfaatannya. Jika unit manfaat bersifat spesifik dan terkuantifikasi, maka perhitungan penyusutan yang lebih logis dan proporsional dapat dilakukan dengan memakai metode unit produksi. Jika intensitas pemanfaatan bersifat

menurun dalam artian pemanfaatan di masa awal pengabdian aset tetap lebih intensif daripada di akhir, maka perhitungan penyusutan yang lebih logis dan proporsional dapat dilakukan dengan memakai metode saldo menurun berganda. Akan tetapi jika unit masa manfaat kurang spesifik dan tidak terkuantifikasi, atau walaupun spesifik dan terkuantifikasi tetapi perhitungan hendak dilakukan semudah mungkin, maka perhitungan penyusutan yang lebih logis dan proporsional dapat dilakukan dengan memakai metode garis lurus. Dengan pengertian di atas, langkah-langkah penetapan metode penyusutan adalah sebagai berikut:

- a) Identifikasi karakteristik fisik aset tetap, kespesifikan dan keterukuran total unit manfaat potensialnya, dan cara serta intensitas pemanfaatannya.
- b) Jika aset tetap memiliki total unit manfaat potensial (perkiraan output) maupun jumlah pemanfaatan per periode yang spesifik dan terukur, maka digunakan penyusutan metode unit produksi.
- c) Dalam hal akan menggunakan penyusutan metode unit produksi, tetapkan perkiraan total output (kapasitas manfaat potensial normal). Hal ini dapat ditentukan dengan menggunakan data dari pabrikan atau dengan taksiran pihak yang berkompeten.
- d) Jika aset tetap dinilai tidak memiliki perkiraan total output atau manfaat potensial maupun jumlah pemanfaatan per periode yang spesifik dan terukur, tetapi diyakini bahwa cara dan intensitas

pemanfaatannya lebih besar di awal masa manfaat aset, maka digunakan penyusutan metode saldo menurun berganda.

- e) Jika aset tetap tidak memiliki total unit manfaat potensial maupun jumlah pemanfaatan per periode yang spesifik dan terukur, dan cara serta intensitas pemanfaatannya sepanjang masa manfaat aset juga tidak jelas, serta ditambah dengan keinginan mendapatkan metode penyusutan yang praktis, digunakan metode penyusutan garis lurus.
- f) Dalam hal menggunakan metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun berganda, tetapkan masa manfaat setiap aset tetap.
- g) Walaupun diketahui perkiraan total output atau manfaat aset tetap seperti dimaksud poin 3 atau penurunan intensitas pemanfaatan dapat ditentukan seperti dimaksud poin 4, demi alasan kepraktisan, perhitungan-perhitungan dengan menggunakan metode garis lurus dapat diterapkan.
- h) Kebijakan yang berhubungan dengan penyusutan dicantumkan dalam Kebijakan Akuntansi.
- i) Dalam kebijakan akuntansi tersebut minimal berisikan hal-hal sebagai berikut:
 - Identifikasi aset yang dapat disusutkan
 - Metode penyusutan yang digunakan
 - Masa manfaat atau tarif penyusutan

6. Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan

Langkah-langkah dalam melakukan perhitungan dan pencatatan penyusutan :

- a) Hitung dan catat porsi penyusutan untuk tahun berjalan dengan menggunakan rumus untuk metode yang dipilih/ditetapkan.
- b) Lakukan perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap tersebut secara konsisten sampai pada akhir masa manfaat aset dengan mendebit akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap dan mengkredit akun Akumulasi Penyusutan.
- c) Susun Daftar Penyusutan guna memfasilitasi perhitungan penyusutan tahun-tahun berikutnya.

Ilustrasi Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan Menurut Metode Penyusutan

a) Metode garis lurus

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya. Presentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun.

Contoh perhitungan:

- a. Dari Kartu Inventaris Barang (KIB) diketahui:
- 1) Nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah sebesar Rp 10.000.000.
 - 2) Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya.
- b. Kondisi aset tetap dalam keadaan baik. Kebijakan Akuntansi mengenai masa manfaat peralatan dan mesin menetapkan mesin fotokopi tersebut mempunyai masa manfaat 5 tahun dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Dari informasi tersebut di atas, perhitungan dan pencatatan penyusutan tahun pertama hingga kelima adalah sebagai berikut:

- a) Nilai aset tetap yang dapat disusutkan sebesar Rp 10.000.000
- b) Penyusutan tahun pertama adalah $Rp\ 10.000.000 : 5 = Rp\ 2.000.000,00$
- c) Catatan tahun pertama adalah:

Jurnal untuk mencatat penyusutan

Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp, 2,000,000,00	
Akumulasi penyusutan		Rp, 2,000,000,00

d) Catatan tahun kedua hingga kelima adalah:

Jurnal untuk mencatat penyusutan

Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp, 2,000,000,00	
Akumulasi penyusutan		Rp, 2,000,000,00

b) Metode Saldo Menurun Ganda

Berdasarkan metode saldo menurun ganda, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai selama masa manfaatnya sebagaimana halnya dalam metode garis lurus. Akan tetapi, persentase besarnya penyusutan adalah dua kali dari persentase yang dipakai dalam metode garis lurus. Persentase penyusutan ini kemudian dikalikan dengan nilai buku.

Contoh:

a. Dari Kartu Inventaris Barang (KIB) diketahui:

- Nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah sebesar Rp 10.000.000
- Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya.

b. Kondisi aset tetap dalam keadaan baik.

c. Kebijakan Akuntansi mengenai masa manfaat peralatan dan mesin menetapkan bahwa mesin fotokopi tersebut mempunyai masa manfaat 5 tahun dan disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda.

Berdasarkan informasi di atas, perhitungan dan pencatatan penyusutan tahun pertama hingga kelima adalah sebagai berikut:

- a. Nilai aset tetap yang dapat disusutkan adalah sebesar Rp 10.000.000
- b. Tarif penyusutan dihitung dengan rumus:

$$\frac{1}{\text{Masa manfaat}} \times 100\% \times 2$$

Jika masa manfaat 5 tahun, maka tarif penyusutannya adalah:

$$\frac{1}{5} \times 100\% \times 2 = 40\%$$

Penyusutan tahun pertama hingga tahun kelima adalah:

Tabel. II.1
contoh
Penyusutan Tahun Pertama hingga Kelima

TAHUN	NILAI BUKU	PERSENTASE PENYUSUTAN	PENYUSUTAN PERTAHUN	AKUMULASI PENYUSUTAN
1	$2 = 2t-1 - 5t-1$	3	$4 = 2 \times 3$	$5 = 5 + 4 t-1 t$
0	10.000.000	40%	0	0
1	10.000.000	40%	4.000.000	4.000.000
2	6.000.000	40%	2.400.000	6.400.000
3	3.600.000	40%	1.440.000	7.840.000
4	2.160.000	40%	864.000	8.704.000
5	1.296.000	Pembulatan/Penyesuaian	1.296.000	10.000.000

Jurnal untuk mencatat penyusutan:

- 1) Penyusutan tahun pertama

Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp. 4.000.000,00
Akumulasi penyusutan	Rp.4.000.000,00

2) Penyusutan tahun kedua

Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp. 2.400.000,00
Akumulasi penyusutan	Rp.2.400.000,00

3) Penyusutan tahun ketiga

Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp. 1.440.000,00
Akumulasi penyusutan	Rp. 1.440.000,00

4) Penyusutan tahun keempat

Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp. 864.400,00
Akumulasi penyusutan	Rp. 864.400,00

5) Penyusutan tahun kelima disesuaikan hingga menghasilkan nilai akumulasi penyusutan yang sama dengan nilai awal/nilai yang dapat disusutkan.

Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp. 1.296.000,00
Akumulasi penyusutan	Rp. 1.296.000,00

c. Metode Unit Produksi

Dengan menggunakan metode unit produksi penyusutan dihitung berdasarkan perkiraan output (kapasitas produksi yang dihasilkan) aset tetap yang bersangkutan. Tarif penyusutan dihitung dengan membandingkan antara nilai yang dapat disusutkan dan perkiraan/estimasi output (kapasitas produksi yang dihasilkan) dalam kapasitas normal.

Contoh:

- a. Dari Kartu Inventaris Barang (KIB) diketahui:
 - Nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah sebesar Rp 12.000.000.
 - Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya.
- b. Kondisi aset tetap dalam keadaan baik. Kebijakan Akuntansi mengenai penyusutan menetapkan metode penyusutan yang digunakan adalah metode unit produksi.
- c. Kapasitas produksi normal fotokopi adalah 60.000 lembar
- d. Produksi fotokopi sampai tahun kelima adalah 60.000 lembar.
- e. Tarif penyusutan: Nilai yang dapat disusutkan dibagi perkiraan output Rp. $12.000.000/60.000 = \text{Rp } 200$ per lembar.
- f. Jumlah produksi tiap tahun selama lima tahun dan besarnya penyusutan per tahun adalah sebagai berikut:

Table II.2
Penyusutan tahun pertama hingga kelima

Tahun	Produksi Per Tahun (Lembar)	Tarif Penyusutan	Besarnya Penyusutan
1	16.000	200	3.200.000
2	9.200	200	1.840.000
3	11.600	200	2.320.000
4	10.700	200	2.140.000
5	12.500	200	2.500.000
Total	60.000		12.000.000

Jurnal untuk mencatat penyusutan:

a. Penyusutan Tahun Pertama:

Beban Penyusutan	Rp. 3.200.000,00
Akumulasi Penyusutan	Rp. 3.200.000,00

b. Penyusutan Tahun Kedua:

Beban Penyusutan	Rp. 1.840.000,00
Akumulasi Penyusutan	Rp. 1.840.000,00

c. Penyusutan Tahun Ketiga:

Beban Penyusutan	Rp. 2.320.000,00
Akumulasi Penyusutan	Rp. 2.320.000,00

d. Penyusutan Tahun Keempat:

Beban Penyusutan	Rp. 2.140.000,00
Akumulasi Penyusutan	Rp. 2.140.000,00

e. Penyusutan Tahun Kelima:

Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp. 2.500.000,00
Akumulasi penyusutan	Rp. 2.500.000,00

7. Penyajian Penyusutan

Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam neraca dan laporan operasional. Penyusutan disajikan dalam neraca dengan akun akumulasi penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap. Penyusutan disajikan dalam Laporan Operasional sebagai beban penyusutan. Neraca menyajikan akumulasi penyusutan sekaligus nilai

perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Ilustrasi penyajian nilai perolehan aset, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset tetap dalam neraca sebagian adalah sebagai berikut:

Tanah		120.000.000.000
Peralatan dan Mesin	4.000.000.000	
Gedung dan Bangunan	35.000.000.000	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.758.500.000	
Aset Tetap Lainnya	1.656.000.000	
Akumulasi Penyusutan	(2.430.000.000)	
Nilai Buku Aset	<hr/>	50.984.500.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan		4.300.000.000
		<hr/>
		175.284.500.000

Walaupun aset tetap terdiri atas berbagai jenis aset yang menunjukkan nilai perolehan masing-masing, penyusutannya disajikan hanya dalam satu akun Akumulasi Penyusutan. Nilai buku yang tersajikan dalam neraca juga merupakan nilai buku keseluruhan aset tetap. Nilai perolehan aset tetap, jumlah penyusutan dan akumulasinya serta nilai buku per jenis aset tetap disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dari ilustrasi penyajian beban penyusutan dalam Laporan Operasional Entitas X pada tanggal 31 Desember 2xxx, dan dapat digambarkan sebagai berikut

Table II.3
Laporan Operasional Entitas X
Penyajian Beban Penyusutan

No	Uraian	20x1	20x0
1	KEGIATAN OPERASIONAL		
2	PENDAPATAN PERPAJAKAN		
3	Pendapatan Pajak Lainnya	10.000.000	9.000.000
4	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		
5	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	20.250.000	19.500.000
6	JUMLAH PENDAPATAN (3+5)	30.250.000	28.500.000
7			
8	BEBAN		
9	Beban Pegawai	50.135.000	49.865.000
10	Beban Persediaan	8.450.000	8.750.000
11	Beban Penyusutan (metode unit produksi)	12.000.000	11.500.000
12	JUMLAH BEBAN (9+10+11)	70.585.000	70.115.000
13			
14	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (6-12)	(40.335.000)	(41.615.000)
15			
16	KEGIATAN NON OPERASIONAL		
17	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	17.500.000	9.500.000
18	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	17.500.000	9.500.000
19	POS LUAR BIASA		
20	Pendapatan Luar Biasa	250.000	500.000
21	Beban Luar Biasa	100.000	150.000
22	POS LUAR BIASA (20-21)	150.000	350.000
23			
24	SURPLUS/DEFISIT – LO (14+18+22)	(22.685.000)	(31.765.000)

8. Pengungkapan Penyusutan di Dalam CaLK

PSAP 07 menyatakan bahwa informasi penyusutan yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan adalah:

Nilai penyusutan

- 1) Metode penyusutan yang digunakan
- 2) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
- 3) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode

Ke empat hal di atas harus disajikan dalam Neraca, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan. Secara lebih rinci,

hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

1) Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah yang menyangkut penetapan metode penyusutan dan peubahannya, jika ada. Sebagai contoh, penetapan metode penyusutan. Pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Mesin fotocopy disusutkan dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun berganda. Selain itu, penyusutan atas seluruh aset tetap dilakukan dengan metode penyusutan garis lurus.

2) Daftar Aset dan Penyusutannya

Dalam rangka pengungkapan secara penuh, di dalam catatan laporan keuangan juga dapat dimuat rincian dari daftar aset dan penyusutannya guna menunjukkan nilai perolehan bruto, akumulasi penyusutan, dan nilai buku per masing-masing individu aset dan kelompoknya. Apabila disajikan catatan untuk masing-masing aset tetap maka besarnya penyusutan dan akumulasi penyusutan merujuk ke akun Akumulasi Penyusutan.

Contoh Daftar Aset dan Penyusutan seperti dalam tabel berikut:

Table II.4
Contoh
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTANNYA

		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	TANAH			
1.01.01	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	5.000.000.000	-	5.000.000.000
1.04.01	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	10.000.000.000	-	10.000.000.000
				-
	PERALATAN DAN MESIN			-
2.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	4.000.000.000	3.000.000.000	1.000.000.000
2.05.01	Alat Kantor	3.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000
2.05.02	Alat Rumah Tangga	2.500.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000
2.06.02	Alat Komunikasi	2.000.000.000	800.000.000	1.200.000.000
2.08.01	Alat Laboratorium	3.500.000.000	1.312.500.000	2.187.500.000
2.12.01	Komputer Unit	1.500.000.000	1.000.000.000	500.000.000
2.12.02	Peralatan Komputer	500.000.000	333.333.333	166.666.667
			-	-
	GEDUNG DAN BANGUNAN		-	-
1.06.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	45.000.000.000	29.250.000.000	15.750.000.000
1.06.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.200.000.000	420.000.000	780.000.000
			-	-
	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN		-	-
1.02.01	Jalan Nasional	250.000.000.000	83.333.333.333	166.666.666.667
1.03.01	Irigasi	110.000.000.000	58.666.666.667	51.333.333.333
			-	-
			-	-
	ASET TETAP LAINNYA		-	-
2.09	Koleksi Perpustakaan/Buku	500.000.000	375.000.000	125.000.000
2.10	Peralatan Olahraga	100.000.000	25.000.000	75.000.000
				-
5.00	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	55.000.000.000	-	55.000.000.000
TOTAL		493.800.000.000	180.515.833.333	313.284.166.667

B. Penelitian Terdahulu

Table II.6
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1	Ajeng Citra Larasati Mardjani (2015)	Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut SAK dan Peraturan Perpajakan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada PT. Utama Karya Manado	Penerapan metode penyusutan garis lurus yang belum konsisten.
2	Widya Susanti (2015)	Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut SAK dan Peraturan Perpajakan Untuk Menentukan Pajak Tangguhan Di PT. Armino Intecorp	Metode Penyusutan Yang Tidak Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perpajakan. Dampak perbedaan hasil perhitungan penyusutan tersebut mengakibatkan timbulnya pajak tangguhan. Saran dari penulisan adanya tinjauan kembali atas tarif penyusutan.
3	Muhammad Fitrianto (2008)	Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Pada Pemerintah Kota Tangerang	Pengelolaan Keuangan Kota Tangerang pada Tahun Anggaran (TA) 2007 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

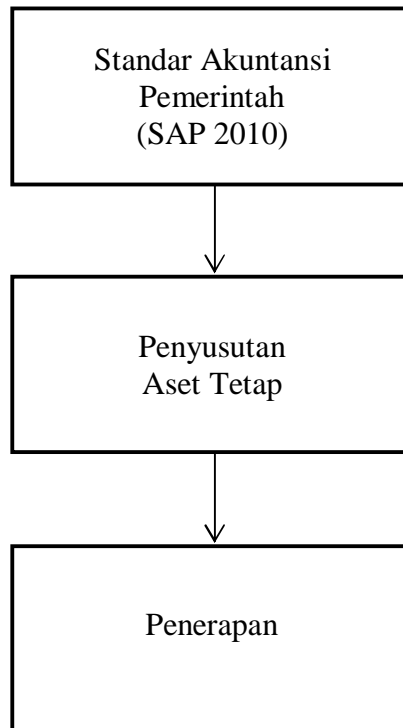
C. Kerangka Berpikir

Aset tetap atau aktiva tetap merupakan jenis asset tidak lancar yang biasanya dibeli untuk digunakan untuk operasi dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Perusahaan pada umumnya dalam menjalankan aktivitasnya selalu memerlukan aktiva tetap dalam menunjang tercapainya tujuan dari perusahaan tersebut.

Proses alokasi sebagian harga perolehan aktiva menjadi biaya (*costallocation*), sehingga biaya tersebut mengurangi laba usaha. Pengertian penyusutan ini tidak sama seperti pengertian dalam ekonomi perusahaan yang menekankan bahwa penyusutan itu merupakan cadangan untuk pembelian aktiva tetap baru setelah aktiva tetap yang lama tidak dipakai lagi.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 07) sebagai penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu asset. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan basis akrual dalam SAP. PSAP 07 mengatur penyusutan pada bagian pengukuran asset tetap dan penyajiannya pada periode-periode setelah pengakuan awal nilai asset tetap.

Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusutan aset tetap.



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu untuk menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sample. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan dan menggambarkan data yang telah terkumpul serta menerapkannya sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen.

Menurut Moh Nazir (2009, hal 54), “Pendekatan deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki”.

B. Defenisi Operasional

Definisi operasional variabel penelitian adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau

menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut (Moh. Nazir, 2003, hal126).

Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh instansi yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
2. Penyusutan adalah pengurangan nilai kegunaan aset tetap karena pemakaian, usia, dan sebagainya, yang dapat dibebankan sebagai biaya dalam laporan keuangan instansi.
3. Aset tetap adalah aset jangka panjang atau aset yang relatif permanen, dan merupakan asset berwujud karena terlihat secara fisik. Aset tersebut dimiliki dan digunakan oleh instansi serta tidak dimaksudkan untuk dijual dan sebagai bagian dari kegiatan operasional instansi.
4. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan instansi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja instansi.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Jalan. Asrama No. 143 Medan.

No. Telepon 8452551 – 8452261 Medan – 20126.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu bagi penulis melakukan penelitian ini yaitu mulai dilaksanakan pada bulan November 2017 s/d Maret 2018. Adapun perinciannya sebagai berikut :

Table III.1
Rincian Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	November 2017				Desember 2017				Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Riset																				
3	Penyusunan Proposal																				
4	Seminar Proposal																				
5	Penulisan Skripsi																				
6	Sidang Skripsi																				

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

- a) Data Kuantitatif, merupakan data yang dapat diukur dalam satuan uang yaitu rupiah dan dinyatakan dalam angka yang menunjukkan jumlah atau banyaknya sesuatu. Dalam penelitian ini, jenis data kuantitatif yang diperlukan berupa laporan keuangan, daftar aset tetap instansi.
- b) Data kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Dalam penelitian ini, jenis data kualitatif yang diperlukan berupa penjelasan dari pihak perusahaan, sejarah dan struktur organisasi dalam

instansi serta keterangan-keterangan tertulis dari pihak yang berwenang di instansi.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui pengamatan dan penelitian pada instansi, yang meliputi wawancara terhadap pihak yang berwenang.
2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data, meliputi sejarah singkat instansi, dan struktur organisasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengambil data data yang ada dan mempelajari serta menganalisis.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan judul skripsi.
- 2) Memperoleh gambaran umum dari objek penelitian secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada.
- 3) Mengumpulkan data dari objek penelitian.

- 4) Mengolah data yang diperoleh.
- 5) Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam permasalahan yang ada.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara adalah Kantor Dinas yang membantu Gubernur Sumatera Utara dalam tugas otonomi, tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berskala provinsi (lintas kabupaten/kota). Penyelenggaraan atau terkait dengan kegiatan operasional instansi memanfaatkan aset yang dimiliki oleh instansi, salah satunya adalah aset tetap dan memiliki masa manfaat yang dapat disusutkan.

Laporan tentang Aset Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara disajikan dalam Neraca. Laporan Barang Milik Daerah yang merupakan rangkaian tabel berisi angka nilai aset, yang terdiri atas Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dengan Metode Garis Lurus dalam hal Penyusutan Aset Tetap.

2. Deskripsi Data

a. Analisis Data Penyusutan Aset Tetap

Data Laporan Keuangan Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara mulai dari Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel IV.1, IV.2 dan IV.3.

Tabel IV.1

**NERACA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
Per Desember 2016**

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 14 Urusan Wajib Tenaga Kerja Unit Organisasi : 1 . 14 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Sub Unit Organisasi : 1 . 14 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
URAIAN	2016
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di BULD	0,00
Kas Lainnya	0,00
Setara Kas	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00
Piutang Pendapatan	0,00
Piutang Lainnya	0,00
Penyisihan Lainnya	0,00

Beban di Bayar Dimuka	0,00
Persediaan	395.300,00
JUMLAH ASET LANCAR	395.300,00
INVESTASI JANGKA PANJANG	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	
Investasi Jangka Pnjang kepada Entitas Lainnya	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00
Dana Bergulir	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00
ASET TETAP	
Tanah	25.081.782.600,00
Peralatan dan Mesin	7.123.319.697,00
Gedung dan Bangunan	11.246.862.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	84.790.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
Akumulasi Penyusutan	(16.451.006.658,00)
JUMLAH ASET TETAP	27.085.747.639,00
DANA CADANGAN	
Dana Cadangan	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00
ASET LAINNYA	
Tagihan Jangka Panjang	0,00
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00
Aset Lain-lain	8.963.910.350,00
JUMLAH ASET LAINNYA	8.963.910.350,00
JUMLAH ASET	36.049.657.989,00

KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)		0,00
Utang Bunga		0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00
Utang Beban		21.045.883,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		21.045.883,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri		0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	21.045.883,00
EKUITAS		
EKUITAS		42.433.942.594,00
	JUMLAH EKUITAS DAN EKUITAS DANA	42.454.988.477,00

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018

Tabel IV.2
NERACA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
Per Desember 2015

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 14 Unit Organisasi : 1 . 14 . 01 Sub Unit Organisasi : 1 . 14 . 01 . 01	Urusan Wajib Tenaga Kerja DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
URAIAN	2015
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di BULD	0,00
Kas Lainnya	0,00
Setara Kas	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00
Piutang Pendapatan	0,00
Piutang Lainnya	0,00
Penyisihan Lainnya	0,00
Beban di Bayar Dimuka	0,00
Persediaan	200.000,00
JUMLAH ASET LANCAR	200.000,00
INVESTASI JANGKA PANJANG	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	
Investasi Jangka Pnjang kepada Entitas Lainnya	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00
Dana Bergulir	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00

ASET TETAP	
Tanah	25.081.782.600,00
Peralatan dan Mesin	6.820.251.197,00
Gedung dan Bangunan	10.585.791.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	84.790.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
Akumulasi Penyusutan	(15.235.282.348,00)
JUMLAH ASET TETAP	27.337.332.449,00
DANA CADANGAN	
Dana Cadangan	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00
ASET LAINNYA	
Tagihan Jangka Panjang	0,00
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00
Aset Lain-lain	8.963.910.350,00
JUMLAH ASET LAINNYA	8.963.910.350,00
JUMLAH ASET	36.301242.799,00
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	0,00
Utang Bunga	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00
Utang Beban	46.645.296,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	46.645.296,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Utang Dalam Negeri	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	46.645.296,00
EKUITAS	
EKUITAS	42.443.512.388,00
JUMLAH EKUITAS DAN EKUITAS DANA	42.480.157.684,00

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018

Tabel IV.3
NERACA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
Per Desember 2014

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 14 Unit Organisasi : 1 . 14 . 01 Sub Unit Organisasi : 1 . 14 . 01 . 01	Urusan Wajib Tenaga Kerja DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
URAIAN	2014
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di BULD	0,00
Kas Lainnya	0,00
Setara Kas	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00
Piutang Pendapatan	0,00
Piutang Lainnya	0,00
Penyisihan Lainnya	0,00
Beban di Bayar Dimuka	0,00
Persediaan	298.700,00
JUMLAH ASET LANCAR	298.700,00
INVESTASI JANGKA PANJANG	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00
Dana Bergulir	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00

ASET TETAP	
Tanah	35.220.487.100,00
Peralatan dan Mesin	6.773.290.597,00
Gedung dan Bangunan	11.876.707.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	84.790.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
Akumulasi Penyusutan	0,00
JUMLAH ASET TETAP	53.955.274.697,00
DANA CADANGAN	
Dana Cadangan	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00
ASET LAINNYA	
Tagihan Jangka Panjang	0,00
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00
Aset Lain-lain	9.003.390.296,00
JUMLAH ASET LAINNYA	9.003.390.296,00
JUMLAH ASET	62.988.963.693,00
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	0,00
Utang Bunga	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00
Utang Beban	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Utang Dalam Negeri	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00
EKUITAS	
EKUITAS	62.988.963.693,00
JUMLAH EKUITAS DAN EKUITAS DANA	62.988.963.693,00

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018

Pada table IV.1, IV.2 dan IV.3 diatas berdasarkan laporan keuangan Neraca tahun 2014, 2015, dan 2016 yang diperoleh, Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2010. Pada Tahun 2015 dan 2016 Instansi melakukan akumulasi penyusutan setiap tahun. Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 27.085.747.639, sedangkan berdasarkan nilai Aset Tetap pada Tahun 2015 sebesar Rp.27.337.332.449. Penerapan SAP 2010 Berbasis Akrual berdampak pada munculnya akumulasi penyusutan terhadap aset. Namun, pada laporan keuangan tahun 2014 tidak menunjukkan adanya akumulasi penyusutan pada aset tetap. Salah satu kendala yang membuat instansi tidak menyusutkan aset tetapnya adalah karena tahun 2014 belum menerapkan basis akrual, maka akumulasi penyusutan belum diakui dan masih menerapkan basis kas pada tahun tersebut dengan nilai aset tetap sebesar Rp. 53.955.274.697.

b. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penyusutan Aset Tetap Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

Berikut ini adalah rincian nama barang aset dan nilai rupiahnya tahun 2014, 2015 dan 2016 yang dapat dilihat pada tabel IV.4, IV.5 dan IV.6.

Tabel IV.4
Data Neraca Aset
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2016

No. Urut	Golongan	Kode Barang	Nama Barang	Total (Rupiah)
1	2	3	4	5
1	01		TANAH	25.081.782.600
		01	Tanah	25.081.782.600
2	02		PERALATAN & MESIN	7.123.319.697
		02	Alat-alat Besar	19.644.000
		03	Alat-alat Angkutan	3.375.801.155
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0
		05	Alat Pertanian	0
		06	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	3.598.918.342
		07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	99.955.000
		08	Alat-alat Kedokteran	0
		09	Alat Laboratorium	0
		10	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	29.001.200
3	03		GEDUNG & BANGUNAN	11.246.862.000
		11	Bangunan Gedung	11.246.862.000
		12	Monumen	0
4	04		JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	84.790.000
		13	Jalan dan Jembatan	84.790.000
		14	Bangunan Air/Irigasi	0
		15	Instalasi	0
		16	Jaringan	0
5	05		ASET TETAP LAINNYA	0
		17	Buku dan Perpustakaan	0
		18	Barang Bercorak Kebudayaan	0
		19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0
		20	Aset Tetap Renovasi	0
6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0
		21	Konstruksi Dalam Pekerjaan	0
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP				16.451.006.658
TOTAL ASET TETAP				27.085.747.639
7	07		ASET LAINNYA	8.963.910.350
		20	Aset Lainnya	0
		21	Rusak Berat	8.382.902.350
		22	Aset Non Operasional (Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain)	581.008.000
		23	Aset Yang Dikerjasamakan dengan pihak ke 3	0
		24	Aset Tak Berwujud	0
AKUMULASI AMORTISASI				0
TOTAL ASET LAINNYA				8.963.910.350
TOTAL ASET				36.049.657.989

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018

Berdasarkan tabel IV.4 diatas neraca aset tahun 2016 yang merincikan nama barang dan nilai rupiahnya dengan total aset tetap sebesar Rp. 27.085.747.639,- . Tahun 2016 ini penerapan basis akrual berdampak pada munculnya akumulasi penyusutan yang melakukan perhitungan penyusutan aset tetap yaitu, Tanah dengan nilai Rp. 25.081.782.600,- Peralatan dan Mesin dengan

nilai Rp. 7.123.319.697,- Gedung dan Bangunan dengan nilai Rp. 11.246.862.000,- Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan nilai Rp. 84.790.000, Aset Tetap Lainnya Rp.0,- Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 0,- dengan beban penyusutan pada akumulasi penyusutan Aset Tetap sebesar Rp. 16.451.006.658,- sehingga total aset yang didapat sebesar Rp. 36.049.657.989,-.

Tabel IV.5
Data Neraca Aset
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2015

No. Urut	Golongan	Kode Barang	Nama Barang	Total (Rupiah)
1	2	3	4	5
1	01		TANAH	25.081.782.600
		01	Tanah	25.081.782.600
2	02		PERALATAN & MESIN	6.820.251.197
		02	Alat-alat Besar	19.644.000
		03	Alat-alat Angkutan	3.375.801.155
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0
		05	Alat Pertanian	0
		06	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	3.299.944.842
		07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	95.860.000
		08	Alat-alat Kedokteran	0
		09	Alat Laboratorium	0
		10	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	29.001.200
3	03		GEDUNG & BANGUNAN	10.585.791.000
		11	Bangunan Gedung	10.585.791.000
		12	Monumen	0
4	04		JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	84.790.000
		13	Jalan dan Jembatan	84.790.000
		14	Bangunan Air/Irigasi	0
		15	Instalasi	0
		16	Jaringan	0
5	05		ASET TETAP LAINNYA	0
		17	Buku dan Perpustakaan	0
		18	Barang Bercorak Kebudayaan	0
		19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0
		20	Aset Tetap Renovasi	0
6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0
		21	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP				15.235.282.348
TOTAL ASET TETAP				27.337.332.449
7	07		ASET LAINNYA	8.963.910.350
		20	Aset Lainnya	0
		21	Rusak Berat	8.382.902.350
		22	Aset Non Operasional (Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain)	581.008.000
		23	Aset Yang Dikerjasakan dengan pihak ke 3	0
		24	Aset Tak Berwujud	0
AKUMULASI AMORTISASI				0
TOTAL ASET LAINNYA				8.963.910.350
TOTAL ASET				36.301242.799

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018

Berdasarkan tabel IV.5 diatas neraca aset tahun 2015 yang merincikan nama barang dan nilai rupiahnya dengan total aset tetap sebesar Rp. 27.337.332.449,- . Tahun 2015 ini penerapan basis akrual berdampak pada munculnya akumulasi penyusutan yang melakukan perhitungan penyusutan aset tetap yaitu, Tanah dengan nilai Rp. 25.081.782.600,- Peralatan dan Mesin dengan nilai Rp. 6.820.251.197,- Gedung dan Bangunan dengan nilai Rp. 10.585.791.000,- Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan nilai Rp. 84.790.000, Aset Tetap Lainnya Rp.0,- Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 0,- dengan beban penyusutan pada akumulasi penyusutan Aset Tetap sebesar Rp. 15.235.282.348,- sehingga total aset yang didapat sebesar Rp. 36.301.242.799,-. Pada tahun 2015 inilah penerapan basis akrual Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2010 untuk Penyusutan Aset Tetap berlaku sehingga instansi melakukan penyusutan.

Tabel IV.6
Data Neraca Aset
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2014

No. Urut	Golongan	Kode Barang	Nama Barang	Total (Rupiah)
1	2	3	4	5
1	01		TANAH	35.220.487.100
		01	Tanah	35.220.487.100
2	02		PERALATAN & MESIN	6.673.251.197
		02	Alat-alat Besar	19.644.000
		03	Alat-alat Angkutan	3.375.801.155
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0
		05	Alat Pertanian	0
		06	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	3.152.944.842
		07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	95.860.000
		08	Alat-alat Kedokteran	0
		09	Alat Laboratorium	0
		10	Alat-alat Persejataan/Keamanan	29.001.200
3	03		GEDUNG & BANGUNAN	11.827.102.000
		11	Bangunan Gedung	11.827.102.000
		12	Monumen	0
4	04		JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	84.790.000
		13	Jalan dan Jembatan	84.790.000
		14	Bangunan Air/Irigasi	0
		15	Instalasi	0
		16	Jaringan	0
5	05		ASET TETAP LAINNYA	0
		17	Buku dan Perpustakaan	0
		18	Barang Bercorak Kebudayaan	0
		19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0
		20	Aset Tetap Renovasi	0
6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0
		21	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP				0
TOTAL ASET TETAP				53.955.274.697
7	07		ASET LAINNYA	9.033.390.296
		20	Aset Lainnya	0
		21	Rusak Berat	9.033.390.296
		22	Aset Non Operasional (Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain)	0
		23	Aset Yang Dikerjasamakan dengan pihak ke 3	0
		24	Aset Tak Berwujud	0
AKUMULASI AMORTISASI				0
TOTAL ASET LAINNYA				9.033.390.296
TOTAL ASET				62.988.963.693

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018

Berdasarkan tabel IV.6 diatas neraca aset tahun 2014 yang merincikan nama barang dan nilai rupiahnya dengan total aset tetap sebesar Rp. 53.955.274.697,- . Tahun 2014 ini penerapan basis akrual untuk akumulasi penyusutan pada aset tetap belum dilakukan karena pada tahun tersebut penyusutan belum diakui dan masih menerapkan basis kas dengan Standar

Akuntansi Pemerintah tahun 2010. Nilai perolehan Aset Tetap yaitu, Tanah dengan nilai Rp. 35.220.487.100,- Peralatan dan Mesin dengan nilai Rp. 6.673.251.197,- Gedung dan Bangunan dengan nilai Rp. 11.827.102.000,- Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan nilai Rp. 84.790.000, Aset Tetap Lainnya Rp.0,- Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 0,- dan beban penyusutan pada akumulasi penyusutan Aset Tetap yang belum dilakukan perhitungan penyusutan sebesar Rp. 0,- sehingga total aset yang didapat sebesar Rp. 62.988.963.693,-. Pada tahun 2014 masih menerapkan SAP Tahun 2010 Berbasis Kas yang belum melakukan dan memberlakukan penyusutan aset tetap.

Untuk mengetahui Penerapan SAP 2010 terhadap Penyusutan Aset Tetap yaitu Berbasis Akrual dengan Metode Garis Lurus dalam beban penyusutan pada akumulasi penyusutan pada Tahun 2016 dan Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel IV.7 dan IV.8 dibawah ini:

Tabel IV.7
Penyusutan Aset Tetap
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2016

No	Uraian	Masa Manfaat	Harga Perolehan	Beban Penyusutan Tahun 2016
1.	Tanah	-	Rp. 25.081.782.600	Rp. 0
	Tanah	-	Rp. 25.081.782.600	Rp. 0
2.	Peralatan dan Mesin	5	Rp. 7.123.319.697	Rp. 1.424.663.939
	Alat-Alat Besar	5	Rp. 19.644.000	Rp. 3.928.800
	Alat-Alat Angkutan	5	Rp. 3.375.801.155	Rp. 675.160.231
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	Rp. 0	Rp. 0
	Alat Pertanian	-	Rp. 0	Rp. 0
	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	5	Rp. 3.598.918.342	Rp. 719.783.668
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5	Rp. 99.955.000	Rp. 19.991.000
	Alat-alat Kedokteran	-	Rp. 0	Rp. 0
	Alat Labolatorium	-	Rp. 0	Rp. 0
	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	5	Rp. 29.001.200	Rp. 5.800.240
3.	Gedung dan Bangunan	20	Rp. 11.246.862.000	Rp. 562.343.100
	Bangunan Gedung	20	Rp. 11.246.862.000	Rp. 562.343.100
	Monumen	-	Rp. 0	Rp. 0
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5	Rp. 84.790.000	Rp. 16.958.000
	Jalan dan Jembatan	5	Rp. 84.790.000	Rp. 16.958.000
	Bangunan Air/Irigasi	-	Rp. 0	Rp. 0
	Instalasi	-	Rp. 0	Rp. 0
	Jaringan	-	Rp. 0	Rp. 0
5.	Aset Tetap Lainnya	-	Rp. 0	Rp. 0
	Buku dan Perpustakaan	-	Rp. 0	Rp. 0

6.	Barang Bercorak Kebudayaan	-	Rp. 0	Rp. 0
	Hewan dan Ternak Serta Tanaman	-	Rp. 0	Rp. 0
	Aset Tetap Renovasi	-	Rp. 0	Rp. 0
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	Rp. 0	Rp. 0
	Konstruksi Dalam Pekerjaan	-	Rp. 0	Rp. 0

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018

Tabel IV.8
Penyusutan Aset Tetap
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2015

No	Uraian	Masa Manfaat	Harga Perolehan	Beban Penyusutan Tahun 2016
1.	Tanah	-	Rp. 25.081.782.600	Rp. 0
	Tanah	-	Rp. 25.081.782.600	Rp. 0
2.	Peralatan dan Mesin	5	Rp. 6.820.251.197	Rp. 1.364.050.239
	Alat-Alat Besar	5	Rp. 19.644.000	Rp. 3.928.800
	Alat-Alat Angkutan	5	Rp. 3.375.801.155	Rp. 675.160.231
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	Rp. 0	Rp. 0
	Alat Pertanian	-	Rp. 0	Rp. 0
	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	5	Rp. 3.299.944.842	Rp. 659.988.968
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5	Rp. 95.860.000	Rp. 19.172.000
	Alat-alat Kedokteran	-	Rp. 0	Rp. 0
	Alat Labolaturium	-	Rp. 0	Rp. 0
	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	5	Rp. 29.001.200	Rp. 5.800.240
3.	Gedung dan Bangunan	20	Rp. 10.585.791.000	Rp. 529.289.550
	Bangunan Gedung	20	Rp. 10.585.791.000	Rp. 529.289.550
	Monumen	-	Rp. 0	Rp. 0
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5	Rp. 84.790.000	Rp. 16.958.000
	Jalan dan Jembatan	5	Rp. 84.790.000	Rp. 16.958.000
	Bangunan Air/Irigasi	-	Rp. 0	Rp. 0
	Instalasi	-	Rp. 0	Rp. 0
	Jaringan	-	Rp. 0	Rp. 0
5.	Aset Tetap Lainnya	-	Rp. 0	Rp. 0
	Buku dan Perpustakaan	-	Rp. 0	Rp. 0
	Barang Bercorak Kebudayaan	-	Rp. 0	Rp. 0
	Hewan dan Ternak Serta Tanaman	-	Rp. 0	Rp. 0
	Aset Tetap Renovasi	-	Rp. 0	Rp. 0
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	Rp. 0	Rp. 0
	Konstruksi Dalam Pekerjaan	-	Rp. 0	Rp. 0

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018

Pada tabel IV.7 dan IV.8 menunjukkan bahwa data tentang metode penyusutan aset tetap yang diterapkan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Instansi mengidentifikasi aset tetap sebagai aset tetap berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai yang digunakan dalam kegiatan operasional instansi, tidak dimaksudkan untuk dijual dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Metode garis lurus adalah metode penyusutan yang menghasilkan nilai penyusutan yang sama, dimana selisih antara harga perolehan

aset tetap dengan nilai residunya dibagi dengan masa manfaat aset yang akan menghasilkan beban penyusutan periodik. Instansi melakukan akumulasi penyusutan setiap tahun. Untuk menentukan masa manfaat, instansi menentukan sendiri berdasarkan pengalaman masa lalu dengan aset yang sama seperti pada tabel diatas yaitu tabel IV.7 dan IV.8.

Pada tabel IV.7 data penyusutan aset tetap tahun 2016, Tanah dengan Harga perolehan Rp. 25.081.782.600,- dan pada tanah tidak ada penyusutan, Peralatan dan Mesin harga perolehan sebesar Rp. 7.123.319.697,- dengan masa manfaat 5 tahun sehingga menghasilkan beban penyusutan sebesar Rp. 1.424.663.939,- uraiannya yaitu Alat-Alat Besar dengan harga perolehan Rp. 19.644.000,- dibagi dengan masa manfaat 5 tahun menghasilkan beban penyusutan sebesar Rp. 3.928.800,- , Alat-Alat Angkutan dengan harga perolehan sebesar Rp. 3.375.801.155,- dibagi dengan masa manfaat 5 tahun menghasilkan beban penyusutan sebesar Rp. 675.160.231,- Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga dengan harga perolehan sebesar Rp. 3.598.918.342,- dibagi masa manfaat 5 tahun menghasilkan beban penyusutan Rp. 719.783.668,- , Alat Studio dan Alat Komunikasi dengan harga perolehan sebesar Rp. 99.955.000,- dibagi dengan masa manfaat 5 tahun menghasilkan beban penyusutan Rp. 19.991.000,- Alat-alat Persenjataan/Keamanan dengan harga perolehan sebesar Rp. 29.001.200,- dibagi dengan masa manfaat 5 tahun menghasilkan beban penyusutan Rp. 5.800.240,- , dan jumlah pada beban penyusutan Peralatan dan Mesin Sebesar Rp. 1.424.663.939,-. Gedung dan Bangunan harga perolehan sebesar Rp. 11.246.862.000,- dengan masa manfaat 20 tahun menghasilkan beban penyusutan

sebesar Rp. 562.343.100,-, urainnya yaitu Bangunan Gedung harga perolehan sebesar Rp. 11.246.862.000,- dibagi masa manfaat 20 tahun menghasilkan beban penyusutan Rp. 562.343.100,- . Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan harga perolehan sebesar Rp. 84.790.000,- dibagi masa manfaat 5 tahun menghasilkan beban penyusutan Rp. 16.958.000,- . sehingga total penyusutan aset tetap pada tahun 2016 sebesar Rp. 16.451.006.658,- pada akumulasi penyusutan.

Pada tabel IV.8 data penyusutan aset tetap tahun 2015, Tanah dengan Harga perolehan Rp. 25.081.782.600,- dan pada tanah tidak ada penyusutan, Peralatan dan Mesin harga perolehan sebesar Rp. 6.820.251.197,- dengan masa manfaat 5 tahun sehingga menghasilkan beban penyusutan sebesar Rp. 1.364.050.239,- uraiannya yaitu Alat-Alat Besar dengan harga perolehan Rp. 19.644.000,- dibagi dengan masa manfaat 5 tahun menghasilkan beban penyusutan sebesar Rp. 3.928.800,- , Alat-Alat Angkutan dengan harga perolehan sebesar Rp. 3.375.801.155,- dibagi dengan masa manfaat 5 tahun menghasilkan beban penyusutan sebesar Rp. 675.160.231,- Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga dengan harga perolehan sebesar Rp. 3.299.944.842,- dibagi masa manfaat 5 tahun menghasilkan beban penyusutan Rp. 659.988.968,- , Alat Studio dan Alat Komunikasi dengan harga perolehan sebesar Rp. 95.860.000,- dibagi dengan masa manfaat 5 tahun menghasilkan beban penyusutan Rp. 19.172.000,- Alat-alat Persenjataan/Keamanan dengan harga perolehan sebesar Rp. 29.001.200,- dibagi dengan masa manfaat 5 tahun menghasilkan beban penyusutan Rp. 5.800.240,- , dan jumlah pada beban penyusutan Peralatan dan Mesin Sebesar Rp. 1.424.663.939,-. Gedung dan Bangunan harga perolehan sebesar Rp.

10.585.791.000,- dengan masa manfaat 20 tahun menghasilkan beban penyusutan sebesar Rp. 529.289.550,-, urainnya yaitu Bangunan Gedung harga perolehan sebesar Rp. 10.585.791.000,- dibagi masa manfaat 20 tahun menghasilkan beban penyusutan Rp. 529.289.550,- . Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan harga perolehan sebesar Rp. 84.790.000,- dibagi masa manfaat 5 tahun menghasilkan beban penyusutan Rp. 16.958.000,- sehingga total penyusutan aset tetap pada tahun 2015 sebesar Rp. 15.235.282.348,- pada akumulasi penyusutan.

B. Pembahasan

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Penyusutan Aset Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan dari wawancara hasil penelitian diatas, menurut Ibu Syahrina Yuska, S. Psi, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penyusutan Aset Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan PP/71 Tahun 2010 dan untuk penyusutan aset tetap penerapannya juga sesuai dengan SAP 2010 Berbasis Akrual yang mulai diterapkan dan diakui pada tahun 2015 sehingga pada tahun 2014 belum ada pengakuan dan dilakukan penyusutan aset tetap dikarenakan pada tahun 2014 masih menerapkan Basis Kas yang belum menentukan penyusutan aset tetap pada neraca.

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan beban penyusutan secara merata selama masa manfaatnya. Persentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini

dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun.

Pada laporan keuangan neraca tahun 2016 dan 2015 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara menghitung beban penyusutan. Tetapi tidak pada tahun 2014 yang tidak menghitung beban penyusutan.

2. Kendala Pada Penerapan Penyusutan Aset Tetap

Kendala yang terjadi dikarenakan pada tahun tersebut belum mengakui adanya beban penyusutan, tahun 2014 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara masih menerapkan SAP PP/71 tahun 2010 berbasis kas dan belum ada pengakuan beban penyusutan serta belum ada keterangan yang mengatur tentang metode penyusutan aset tetap, sehingga beban penyusutan baru diakui dan diterapkan pada tahun 2015 yang mulai menerapkan SAP PP/71 tahun 2010 berbasis akrual yang mengatur adanya metode penyusutan aset tetap untuk menghitung beban penyusutan. Besarnya penyusutan dilakukan setiap tahun dan disajikan dalam neraca laporan keuangan dengan akun akumulasi penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap penyusutan aset tetap pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara penerapan SAP dimaksud adalah merujuk pada PP/71 Tahun 2010 berbasis akrual yang sesuai ketentuan harus dilaksanakan Pemda Se-Indonesia, dalam laporan keuangan neraca yang menyajikan nilai aset wajar sesuai dengan PP/71 Tahun 2010.
2. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014, kendala yang terjadi dikarenakan pada tahun tersebut masih menerapkan SAP 2010 berbasis kas yang belum mengakui adanya penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, penerapan yang dimaksud adalah sesuai dengan PP/71 Tahun 2010 berbasis akrual untuk menghitung beban penyusutan yang dimulai tahun 2015 pada akumulasi penyusutan yang disajikan pada neraca.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka saran-saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara diharapkan kedepan, penerapan SAP tetap sesuai aturan.
2. Pada Bagian Aset dan Bagian Akuntansi tetap cakap dalam pengelolaan aset yang dimiliki oleh instansi.

DAFTAR PUSTAKA

Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati (2013). *Akuntansi Perpajakan* : Edisi 3.

Salemba Empat : Jakarta

Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati (2012). *Akuntansi Perpajakan* : Edisi 2

Revisi. Salemba Empat : Jakarta

Drs. Pardiat, Ak (2010). *Akuntansi Pajak Lanjutan* : Edisi 2. Mitra Wacana

Media: Jakarta

<http://keuanganlsm.com/penyusutan-depresiasi-menurut-perpajakan/> . Diakses 4

November 2017.

<https://id.scribd.com/doc/100133014/Analisis-Konvergensi-IFRS-Atas-PSAK-16>

[Terhadap-Penyusutan-Aset-Tetap-Pada-PT-Multi-Terminal-Indonesia.](#)

Di Akses 8 November 2017.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, (2010). *SAP Buletin Teknis Standar*

Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual :

Nomor 18.

Ajeng Citra Larasati Mardjani, Lintje Kalangi, Robert Lambey, (2015).

Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi

Keuangan dan Peraturan Perpajakan Pengaruhnya Terhadap

Laporan Keuangan Pada PT. Utama Karya Manado. "Jurnal EMBA

Vol. 3 No. 1 Maret 2015, Hal 1024-1033.

Widya Susanti, (2015). *Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan UU Perpajakan Untuk Menentukan Pajak Tangguhan Pada PT. Armindo Intercorp.* "Jurnal Akuntansi UBHARA. 2015, ISSN: 2460-7762.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, (2012). *SAP Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010*. Salemba Empat: Jakarta.

Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati, (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Jilid 1. Salemba Empat: Jakarta.

Drs. Revisond Baswir, M.B.A, Ak, (2012). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Edisi 2. BPFE: Yogyakarta.

Nurmalia Hasanah, Achmad Fauzi, (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Jilid 1. In Media: Bogor.

Bachtiar Arif, Muchlis, Iskandar, (2002). *Akuntansi Pemerintahan*. Edisi 1. Salemba Empat: Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, (2010). *Persandingan Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008. Susunan Dalam Satu Naskah UU No. 7/1983 STDD No. 36/2008*. Jakarta.